

jabatan anggota kabinet (menteri) hanya 4%. Di Asia tercatat hanya 5 pemerintahan atau kepala negara yakni, Indira Gandhi di India, Siri Maro Bandaranaike di Srilanka, Khalida Zia di Bangladesh, Corazon Aquino di Filipina dan Benazir Bhutto di Pakistan¹. jika dilihat fenomena saat ini Indonesia juga termasuk salah satu negara yang pernah memiliki presiden perempuan yaitu Megawati.

Dari sebuah fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, apakah disahkannya Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) oleh PBB telah membawa nasib perempuan kearah yang lebih baik, sehingga perannya dalam mengambil sebuah kebijakan juga dapat diperhitungkan, serta bagaimana realisasi konvensi tersebut, dimana secara resmi di Indonesia disebut sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984².

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk meneliti Partai Amanat Nasional (PAN) DPC Kota Singkawang Kalimantan Barat, PAN merupakan satu-satunya partai yang memasukan kesetaraan gender dalam platformnya³, jika dilihat dari platform yang dimiliki PAN menunjukkan bahwa PAN cukup konsen dengan adanya pemberdayaan perempuan, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana CEDAW pada Partai Amanat Nasional yang merupakan satu-satunya partai yang memasukan kesetaraan gender dalam platformnya.

¹ Alfi Majidah, " Gambaran Aktivistis Wanita Masa Kini dalam Politik." Dalam *jurnal da'wah Alihsas*, No 6, 1997.

² Maria H dan Ninuk MP, "Bergandeng Tangan Melaksanakan CEDAW", *Kompas*, 02 Agustus 2004.

³ Fransiska, "PAN Targetkan 38 Persen Ketamukhilan Perempuan Di Legislatif" *Tanjung*, 26 Juni 2003.

B. Latar Belakang Masalah.

Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan untuk memberikan masa depan yang lebih baik kepada kaum perempuan dunia, dan memberikan hak aktualisasi potensi kepada kaum yang jumlahnya setengah dari populasi dunia ini, konvensi ini terdiri dari 6 bagian dan 30 pasal, pada bagian pertama terlihat dengan jelas isinya yaitu;

“ pengutukan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan upaya menegakkan asas persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita ”⁴.

Pada tahun 1984 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu; Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW), atau yang secara resmi di Indonesia disebut sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984⁵.

Pada kenyatannya, sejarah perempuan untuk menggapai pengakuan agar keberadaannya di dunia publik dapat diterima secara proporsional penuh dengan liku-liku, kebijakan yang dibuat pemerintah selalu menempatkan laki-laki di dunia publik dan perempuan di dunia domestik, hal inilah yang telah melahirkan ketimpangan kekuasaan yang berkepanjangan, perempuan dianggap lebih bertanggung jawab

⁴ Cyber Media, www.kompas.com

⁵ Maria H dan Nisuk MB. “Berpendang Tindakan Melaksanakan CEDAW” K...

terhadap keluarga dan segala aktivitas yang berkaitan dengan rumah tangga, sementara laki-laki dianggap paling bertanggung jawab dalam bidang kegiatan publik seperti bidang ekonomi, politik atau institusi-institusi lain penunjang masyarakat modern.⁶

Di Indonesia, era reformasi yang diharapkan memberikan peluang kepada perempuan untuk berpolitik dan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ternyata masih belum mampu membuat posisi perempuan sama dengan laki-laki, bahkan sebaliknya meminggirkan mereka dipanggung politik formal. Hal ini terbukti dari keterwakilan perempuan yang duduk diparlemen, dari total 500 orang wakil rakyat, hanya kurang lebih 7% saja yang berjenis kelamin perempuan, walaupun disisi lain bisa berbangga karena formulasi ini diakui kualitasnya. Lebih ironisnya lagi, fakta ini merupakan terendah jika dibandingkan dengan masa orde baru yang mencapai 12,5%.⁷

Semakin maraknya perempuan dalam partai politik diharapkan dapat memenuhi aspirasi mereka yang selama ini terbelenggu oleh mitos-mitos sosial serta dapat menciptakan budaya politik yang lebih etis tanpa kekerasan, dengan sifat keibuannya diharapkan mampu mengubah arena perpolitikan yang selalu identik dengan kekerasan dalam perebutan kekuasaan, selain itu perempuan diharapkan mampu bersaing dengan laki-laki, dan tidak menjadi second person dalam setiap menentukan kebijakan umum yang hampir dinyatakan tidak sensitive gender.

⁶ Sugiarti, dkk, "Pembangunan Dalam Prespektif Gender", UMM Press, 2003, hal 3.

⁷ "The Gender Gap in Indonesia"

Kota Singkawang sendiri pada dasarnya ada kecenderungan lebih terbukanya partai politik terhadap keanggotaan perempuan, meskipun pada kenyataannya perempuan yang menempati jabatan struktural pada partai politik masih bisa dikategorikan rendah, dalam penulisan skripsi ini penulis lebih terfokus pada Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan satu-satunya partai yang memasukan kesetaraan gender dalam platformnya, hasil pra penelitian yang dilakukan penulis didapatkan fakta, bahwa PAN di Kota Singkawang Kalimantan Barat tidak begitu konsen terhadap pemberdayaan perempuan, hal ini bisa dibuktikan, intitusi atau wadah khusus untuk perempuan tidak berjalan dengan efektif, wadah itu hanya berlaku menjelang pemilu saja, dimana perempuan diarahkan untuk memilih Calleg-calleg Partai Amanat Nasional yang notabene berjenis kelamin laki-laki, selain itu perempuan yang menduduki jabatan struktural hanya sebatas wakil ketua dan wakil sekretaris, berawal dari latar belakang masalah inilah penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut, apakah CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia belum bisa direalisasikan pada partai yang ada di Indonesia khususnya Partai Amanat Nasional.

C. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah yang ada maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

“Bagaimana realisasi Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) pada partai politik di Indonesia

Hubungan Partai Amanat Nasional (PAN) ... 2004-2009 ...

D. Tujuan Penulisan.

- a. Mengetahui peran dan partisipasi perempuan dalam partai politik
- b. Mengetahui bagaimana realisasi Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) di Partai Amanat Nasional
- c. Mengetahui bagaimana Partai Amanat Nasional memberikan peluang bagi perempuan untuk terjun kedalam arena politik
- d. Memberikan Gambaran secara deskriptif tentang segala fenomena dalam peran dan partisipasi perempuan dalam partai politik.
- e. Memberikan sedikit masukan bagi studi hubungan internasional, mengenai realisasi Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah merupakan uraian yang menjelaskan variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep tertentu. Dan kerangka dasar teori dalam penelitian ini adalah :

1. Partisipasi Politik

1.1 Pengertian Partisipasi Politik

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan

Di bawah ini disajikan pengertian partisipasi politik yang lain yang dikemukakan oleh beberapa sarjana :

Herbert Mc Closki dalam Internasional Encyclopedia of the Social Sciences:

"Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum".⁸

Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Handbook of Political Science:

"Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka". Yang diteropong terutama adalah "tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah", sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi "alokasi nilai secara otoritatif, yaitu usaha-usaha untuk masyarakat".⁹

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice:

"partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif, atau tidak efektif."¹⁰

Transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi hampir selalu diiringi dengan membanjirnya partisipasi politik, termasuk di Indonesia partisipasi politik di Indonesia menjadi melonjak ketika runtuhnya pemerintah orde baru yang menyebabkan membukanya saluran kebebasan untuk berpolitik, dan berpartisipasi dalam kegiatan politik bagi semua

⁸ Miriam Budiardjo, "Partisipasi dan Partai politik Sebuah Bunga Rampai", PT Gramedia, Jakarta, hal 1

⁹ Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, dalam Miriam Budiardjo, *Ibid*, hal 1-2

¹⁰ Norman H. Nie dan Sidney Verba, dalam Miriam Budiardjo, *Ibid* hal 2

golongan masyarakat tidak ketinggalan, kaum perempuan juga tidak lagi segan-segan untuk memasuki wilayah politik, dengan berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik semakin mengalami kemajuan setelah selama 32 tahun masa orde baru perempuan hanya dijadikan second person setelah laki-laki, meskipun kaum perempuan secara kualitatif tidak mengalami perubahan yang signifikan pada saat ini.¹¹

1.2 Jenis-Jenis Partisipasi

Samuel P. Huntington dan *Joan M. Nelson* dalam bukunya *No Easy Choice* memilih partisipasi politik tersebut dalam dua kategori, yakni partisipasi yang bersifat otonom (*autonom participation*) dan partisipasi yang bermobilisasi atau dikenakan oleh pihak lain. (*Mobilized participation*)¹².

1) Partisipasi Otonom

Dalam hal ini partisipasi yang dilaksanakan benar-benar muncul atas kesadaran sendiri tanpa ada pengaruh dari luar, sebagai akibat dari adanya kesadaran individual, kesadaran individual tersebut merupakan pengaruh atau akibat dari beberapa faktor antara lain *pertama*, tingkat pendidikan yang dilampauinya, *kedua*, tingkat ekonomi masyarakat dengan tingkat kemampuan yang ekonomi menengah ke atas, *ketiga*, tingkat dependensi atau ketergantungan

¹¹ Anies Rasyid Baswedan, "Pemanfaatan Lonjakan Partisipasi Politik", *Kompas* Selasa, 12 Juni 2001.

¹² Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, "No Easy Choice" hal 2

masyarakat terhadap pemerintahan semakin kecil tingkat ketergantungan kepada pemerintah maka partisipasi akan bersifat otonom

2) Partisipasi yang dimobilisasi

Merupakan jenis partisipasi yang dilakukan dengan cara pengerahan masa oleh orang-orang atau pun kelompok ataupun oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan politik tertentu keadaan seperti ini biasa disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, *pertama*, mereka adalah orang yang berpendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali, *kedua*, mereka berasal dari masyarakat golongan miskin atau mempunyai ekonomi menengah ke bawah, *ketiga*, sifat ketergantungan terhadap pemerintah terlalu tinggi dan *keempat*, ada tekanan maupun manipulasi dari pihak lain. .

1.3 Bentuk-bentuk partisipasi politik

1. Bentuk konvensional yang merupakan bentuk partisipasi politik yang normal sah atau lazim dalam demokrasi modern
2. Bentuk non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner¹³. Adapun kegiatan-kegiatan yang tergolong dalam bentuk kedua

¹³ Mohtar Mas'ood dan Collin Mac Andrews "Perbandingan sistem politik" Cendek Media Universitas

partisipasi politik tersebut secara lebih lengkapnya ada dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jenis-Jenis Partisipasi

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara (Voting) Diskusi Politik Kegiatan kampanye Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrative	Pengajuan petisi Demonstrasi Konfrontasi Mogok Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) Perang gerilya dan revolusi

Sumber : Mohtar Mas'oed dan Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University, Yogyakarta 1993, hal. 46

2. Partai Politik

2.1 Pengertian Partai Politik

Sebagai salah satu media untuk melakukan partisipasi dalam politik adalah Partai politik, beberapa sarjana memberikan definisi partai politik sebagai berikut:

Menurut Sigmund Neuman

"partai politik adalah : Organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda. Dengan begitu Partai politik itu tidak merupakan nerantara yang hanya yang membicarakan kebijakan dan ideologi-ideologi

sosial dengan lembaga-lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkan dengan aksi politik di dalam masyarakat politis yang luas”¹⁴.

Menurut Carl j. friedrich

*“Partai politik adalah: Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasa terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil atau materii”*¹⁵.

Menurut R.H. Soltau

*“Partai politik adalah: Sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang – dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih - bertujuan mengusai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka”*¹⁶.

Sebagai salah satu sarana partisipasi politik, maka partai politik juga mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

2.2 Fungsi-Fungsi Partai Politik

Fungsi-Fungsi Partai politik menurut Haryanto adalah:¹⁷

- a) *Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi Politik*
- b) *Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik.*
- c) *Partai politik sebagai Sarana komunikasi Politik.*
- d) *Partai Politik Sebagai Sarana Artikulasi Politik Dan Agregasi Kepentingan.*
- e) *Partai Politik Sebagai Sarana Partisipasi Politik.*
- f) *Partai Politik sebagai Sarana Pengatur Konflik.*

¹⁴ Sigmun Neumann, “Kearah Suatu Studi Perbandingan Partai-Partai politik” dalam Miriam Budiardjo (ed) “Partisipasi, sebuah bunga rampai”, PT. Gramedia, Jakarta, 1981, hal 61,62.

¹⁵ Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, PT Gramedia Pustaka Utama, 1998, Hal. 161.

¹⁶ *Ibid*, hal. 161

¹⁷ ...

g) *Partai Politik sebagai Sarana Pembuatan Kebijakan.*

h) *Partai Politik sebagai Sarana Untuk Mengkritik Regim Yang Berkuasa.*

Partisipasi politik perempuan merupakan hal yang penting, tidak hanya untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik, tetapi juga lebih substansi adalah agar perempuan dapat meramaikan persaingan di dalam partai politik, tetapi masuknya perempuan dalam partai politik tidaklah mudah, karena pada dasarnya persepsi yang akan timbul ketika kita terlibat dalam dunia politik khususnya partai politik adalah mempunyai tujuan untuk mencapai kekuasaan, membicarakan kekuasaan adalah hal yang cukup berat, khususnya bagi kaum laki-laki yang selama ini mendominasi partai politik dan bidang formal, berbagi kursi bukanlah sebuah keputusan yang nyaman, karena itu berarti harus berbagi kekuasaan. Pada dasarnya untuk melepas suatu kekuasaan sangatlah berat dan bukan merupakan hal yang mudah, karena alasan apapun apalagi harus bersaing dalam mempertahankan kekuasaan dengan seorang perempuan yang *nota bene* dalam budaya Indonesia perempuan adalah *konco wingking* bagi para pria atau hanya sebagai orang kedua setelah laki-laki dan kadang masih diragukan kualitasnya¹⁸.

F. Definisi konseptual

Yang dimaksud definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep yang lainnya dalam kerangka dasar teori agar tidak terjadi kesalahpahaman.

¹⁸ "Destinasi Politik Perempuan bukan untuk meraih kekuasaan". Kompas, 10 Maret 2002

Definisi konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi politik

Pengertian partisipasi politik secara umum adalah: kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dalam hal ini penulis membatasi partisipasi politik perempuan sampai pada level terpilihnya perempuan menjadi anggota legislatif.

2. Partisipasi politik perempuan

Pengertian partisipasi politik perempuan adalah: Keikutsertaan perempuan dalam politik dengan sukarela tanpa paksaan guna memperjuangkan kepentingan perempuan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar lebih *sensitive gender* dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.

3. Partai politik

Pengertian bahwa yang dimaksud dengan partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sikap orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan dan orientasi-orientasi yang sama dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengembalikan atau mengontrol jalannya roda pemerintahan yang bersangkutan itu pada diri

sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi perempuan dalam partai politik

Keikutsertaan perempuan berada dalam partai politik untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan melalui partai politik baik dengan menjadi anggota partai politik aktif maupun pasif, sebagai anggota partai politik maupun pengurus partai dan memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Dengan berpartisipasi masuk kedalam partai politik, diharapkan perempuan mampu untuk duduk dikursi parlemen.

G. Definisi Operasional.

Definisi operasional adalah indikator-indikator yang dibutuhkan penulis dalam penelitian, yang digunakan untuk lebih mendeskripsikan tentang apa yang akan diteliti.

Menurut *Saifudin Anwar* definisi operasional adalah:

“Definisi operasional adalah batasan atau definisi suatu variabel agar tidak terjadi ambiguous yaitu memiliki makna ganda atau tidak menunjukkan indikator yang jelas”¹⁹.

Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengukur Realisasi Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) pada partai politik di Kota Singkawang.

1. Peran partai politik diukur dari indikator:

- a. Adanya program-program yang mengedepankan perempuan

¹⁹ Saifudin Anwar "Metode Penelitian" Banteng: Balaia, Yogyakarta, 2002, h.170

- b. Adanya institusi sendiri untuk kaum perempuan didalam partai politik
 - c. Tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan dalam partai politik.
2. Partisipasi politik perempuan.
- a. Banyaknya perempuan yang tertarik terjun dalam dunia politik dengan adanya CEDAW dan issue-issue global yang semakin marak. .
 - b. Kesiediaan perempuan untuk mengikuti perkembangan dalam dunia politik baik melalui surat kabar, TV maupun media lain.
3. Partisipasi perempuan dalam partai politik
- a. Masuknya perempuan sebagai simpatisan partai politik tertentu khususnya PAN dengan adanya CEDAW.
 - b. Adanya perempuan yang duduk dalam kepengurusan partai politik dan menempati jabatan struktural tertentu.
 - c. Keikutsertaan perempuan dalam partai politik dan motivasi masuk dalam PAN, keikutsertaan perempuan dalam PAN di ukur dari indikator, *Pertama* kepemilikan kartu anggota, *kedua* punya atau tidak jabatan dalam PAN, *ketiga* keaktifan mengikuti kegiatan yang diadakan PAN.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara utama dalam melakukan penelitian guna mencapai tujuan penelitian dengan cara menentukan terlebih dahulu jenis penelitian,

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Saifudin Azwar penelitian deskriptif adalah:

"Pengertian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistimatif dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi. Contoh penelitian deskriptif yang paling populer adalah penelitian survai"²⁰.

Sedangkan penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah:

"Lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang dinamis, dengan menggunakan logika ilmiah, hal ini bukan berarti pendekatan kualitatif sama sekali tidak didukung data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesa melainkan pada usaha menjawab pertanyaan peneliti melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif"²¹.

Dari konsep-konsep dan pengertian para sarjana di atas maka penulis menarik kesimpulan sendiri bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang pada prinsipnya dalam penyajian akhir nanti penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif dan tidak menutup kemungkinan penggunaan pendekatan kuantitatif jika di-

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: dengan observasi, interview (Wawancara), studi pustaka, kuisisioner dimana cara pengumpulan data dengan cara memberi angket yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan tertulis mengenai suatu hal yang harus dikerjakan oleh yang menjadi sasaran penyelidikan tersebut.

Dalam hal ini Sutrisno Hadi berpendapat bahwa dalam distribusinya kuisisioner dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Suatu kuisisioner disebut kuisisioner *langsung*, jika daftar pertanyaan dikirim langsung, dan tidak langsung kepada orang yang ingin dimintai pendapatnya, keyakinannya, atau diminta menceritakan tentang keadaan dirinya. Sebaliknya jika daftar pertanyaan dikirimkan kepada seseorang yang diminta menceritakan keadaan orang lain, kuisisioner tersebut disebut kuisisioner *tidak langsung*²².

Dan dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode kuisisioner tipe pilihan atau tipe kuisisioner tertutup, dengan alasan agar penulis lebih mudah dalam proses pengumpulan data, dan juga bisa dilakukan sekaligus dalam satu pertemuan dengan responden yang nantinya akan diberi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden dengan jawaban pilihan ganda yang telah disediakan oleh penulis.

²² Sutrisno Hadi, "Metode Penelitian II/2", Yayasan Penelitian, Esak, Balikpapan UGM, Yogyakarta

3. Lokasi Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokasi

Daerah yang menjadi obyek penelitian adalah DPC PAN Kota Singkawang Kalimantan Barat, alasan penulis tertarik memilih penelitian Partai Amanat Nasional (PAN) kota Singkawang dikarenakan banyaknya perempuan dikota Singkawang yang masuk kedalam dunia politik, tapi pada kenyataannya jumlah perempuan yang menempati jabatan struktural masih minim, Partai Amanat Nasional (PAN) sendiri tentunya mampu membawa nasib perempuan ke arah yang lebih baik dan dapat dijadikan contoh oleh partai-partai lainnya, karena sampai saat ini hanya Partai Amanat Nasional yang memasukan kesetaraan gender dalam platformnya, dengan menaruh harapan besar penulis berharap CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia dapat terealisasikan pada Partai Amanat Nasional.

4. Populasi dan Sampel

4.1. Pengertian Populasi

Pengertian populasi menurut kamus riset karangan Komaruddin yang dimaksud dengan populasi adalah;

"Semua individu yang menjadi sumber pengambilan sample, pada kenyataannya populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus-kasus tersebut dapat berupa orang, barang, binatang, hal atau peristiwa"²³.

Dari hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti dalam Partai Amanat Nasional diperoleh data jumlah simpatisan perempuan yang ada

²³ Mudjalin, "Metode Penelitian Suatu Pendekatan Dan Teknik", Pustaka Pelajar, 2000, hal. 100

dalam Partai Amanat Nasional adalah 1050 orang simpatisan perempuan yang bergabung dalam Perempuan Persatuan Amanat Nasional (PPAN) baik yang memiliki jabatan struktural maupun yang hanya simpatisan dan populasi ini adalah populasi simpatisan perempuan PAN yang di DPC PAN Kota Singkawang Kalimantan Barat.

4.2. Pengertian Sampling

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebab populasi agar diperoleh sampel yang benar-benar representatif dan mewakili populasi. Dalam hal ini penulis memilih teknik sampling untuk mengukur tingkat perempuan dalam partai politik, dengan teknik populasi sampling karena populasi yang ada dan yang memenuhi kriteria hanya 35 orang dengan kriteria adalah sebagai berikut *Pertama*; anggota atau simpatisan yang bergabung dalam Perempuan Persatuan Amanat Nasional maupun pengurus PAN yang berjenis kelamin perempuan, *Kedua*; anggota maupun pengurus PAN yang aktif dari tahun 2004 – 2009.

Dan sebagai bahan pertimbangan merujuk dari pendapat Suharsimi Arikunto (1996:120) mengemukakan bahwa:

"Untuk sekedar pedoman apabila subyeknya kurang dari 100 lebih maka diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi selanjutnya, jika jumlahnya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung sedikit-tidaknya

- a. Kemampuan peneliti dari segi waktu, tenaga dan dana
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena hal itu menyangkut sedikitnya data.
- c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja sampelnya lebih besar maka hasilnya akan lebih baik"²⁴.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan penataan secara sistematis dari catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan temuan bagi orang lain²⁵.

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.

- a. Analisis Data Kualitatif Yaitu data yang dikumpulkan merupakan studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasikan, dan jumlahnya sedikit.
- b. Analisis Data Kuantitatif

Skala Pengukuran:

Dalam penelitian ini data setiap jawaban dari masing-masing variabel-variabel diberi nilai yaitu:

Nilai 4 untuk jawaban a, jawaban a adalah jawaban dalam kategori *sangat baik*.

²⁴ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Rineka Cipta, Jakarta, hal.120

Nilai 3 untuk jawaban b, jawaban b adalah jawaban dalam kategori *baik*.

Nilai 2 untuk jawaban c, jawaban c adalah jawaban dalam kategori *cukup*.

Nilai 1 untuk jawaban d, jawaban d adalah jawaban dalam kategori *kurang*.

Dengan menggunakan kelas kategori tersebut total jawaban setiap responden dapat diketahui.

Sedangkan untuk mencari interval kelasnya digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Kelas Kategori}}$$

Sehingga diperoleh interval kelas sebagai berikut:

- a. Kategori *sangat tinggi* mempunyai skor antara 3,27 – 4.
- b. Kategori *tinggi* mempunyai skor antara 2,51 – 3,26.
- c. Kategori *sedang* mempunyai skor antara 1,76 – 2,50.
- d. Kategori *rendah* mempunyai skor antara 1 – 1,75.

I. Sistematika Penulisan.

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka teori, hipotesa, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Konvensi Anti Diskriminasi dan Realisasi CEDAW Pada Partai Politik di Indonesia.

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW), affirmative Action di Indonesia, idealnya partai politik berperan sesuai dengan Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW), fakta-fakta yang tidak sesuai dengan (CEDAW).

Bab III Deskripsi Obyek Wilayah

Dalam bab ini akan dijelaskan kehidupan politik di kota Singkawang, serta partisipasi politik perempuan di kota Singkawang.

Bab IV Realisasi CEDAW pada Partai Amanat Nasional Kota Singkawang, Kalbar.

Berisi tentang fakta-fakta dilapangan, setelah penulis melakukan penelitian, serta pembuktian ada atau tidaknya realisasi CEDAW dalam PAN.

Bab V Penutup

Kesimpulan dari bab-bab terdahulu, serta sumbangan yang bisa diberikan